

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) tumbuh secara positif dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,15%. Rasio pertumbuhan pendapatan juga tumbuh secara positif dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,99%. Rasio pertumbuhan belanja operasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan secara positif dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 20,52% jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja modal yang sebesar -2,71% yang mengalami pertumbuhan negatif.
2. Kinerja keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sudah tergolong sedang atau dalam kategori pola hubungan partisipatif. Rinciannya adalah pada tahun 2012 rasio kemandirian sebesar 53,38%, kemudian meningkat menjadi 54,61% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 rasio kemandirian sebesar 54,93% kemudian turun pada tahun 2015 sebesar 50,58%. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan menjadi 50,99%.

3. Kinerja keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari rasio keserasian untuk rasio belanja modal belum stabil dari tahun ke tahun sedangkan untuk belanja operasi terus mengalami peningkatan. Tahun 2012 rasio belanja operasinya sebesar 51,90% mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 53,94%, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi 54,94%, dan pada tahun 2015 naik kembali menjadi 60,23%. Tahun 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 69,15%, sehingga rata-rata rasionya sebesar 58,03%. Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2012 sebesar 21,83% naik menjadi 25,02% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 19,14%, dan turun kembali pada tahun 2015 menjadi 12,50%. Pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali menjadi 11,10% sehingga rata-rata rasionya sebesar 17,92%.
4. Kinerja keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari rasio efektivitas PAD sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 101,88%. Rinciannya adalah pada tahun 2012 sebesar 103,64%, tahun 2013 sebesar 103,53%, tahun 2014 sebesar 101,14%, tahun 2015 sebesar 102,30%, dan tahun 2016 sebesar 98,77%.
5. Kinerja keuangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar 99,90% atau dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata rasionya mendekati 100%, dengan rincian pada tahun 2012 rasio efisiensinya

sebesar 96,19%, kemudian tahun 2013 menjadi 105,27%, tahun 2014 sebesar 92,81%, tahun 2015 sebesar 99,10%, dan tahun 2016 sebesar 106,15%.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang di alami oleh penulis. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya tahun 2012 sampai tahun 2016 sehingga hasilnya kurang maksimal.
2. Data yang digunakan hanya sebatas wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga hasilnya tidak dapat di generalisasikan.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan mengacu pada hasil tersebut maka penulis mengemukakan saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD bisa dilakukan pemerintah daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan

pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi dan menambahkan jumlah periode yang diteliti sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini.